

Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina

Putri Permata A Harahap , Siti Zahra Siagian , Seevaira Chyta Simanullang ,
Victoria Grace Daily , Yuli Indriani Lubis , Yeni Yolanda Simbolon

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email : putrypermaataa@gmail.com sitizahrasiagian@gmail.com seevairachyta@gmail.com

victoriadaely840@gmail.com yuliindriani lubis@gmail.com

yenyolanda376@gmail.com

***Abstract** : This research examines the impact of the Russian-Ukrainian conflict on efforts to resolve the humanitarian crisis. His focus includes Russia's use of the veto in the UN Security Council, the humanitarian impact, and the role of the UN. Russia's 2014 annexation of Crimea was the start of the conflict, with Russia's veto hampering the UN response. Conflicts that result in humanitarian crises, massive displacement, human rights violations and loss of life. This research also explores the UN's role in mediation, dealing with political obstacles and tensions on the ground. Through analysis of previous literature and research, this research seeks a deeper understanding of the dynamics of this conflict and the role of international institutions in overcoming the crisis. Its findings illustrate that Russia's veto hinders decisive action by the UN, while the humanitarian crisis and political tensions complicate the UN's mediation role. This research contributes to understanding the impact of international conflict and the challenges international institutions face in maintaining peace and dealing with humanitarian crises.*

Keywords : *The Role Of PBB, The Conflict Between Russia And Ukraine*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap upaya penyelesaian dan krisis kemanusiaan. Fokusnya meliputi penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB, dampak kemanusiaan, dan peran PBB. Kasus aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 menjadi awal konflik, dengan hak veto Rusia menghambat respons PBB. Konflik mengakibatkan krisis kemanusiaan, memunculkan pengungsian besar-besaran, pelanggaran HAM, dan kerugian nyawa. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran PBB dalam mediasi, menghadapi hambatan politik dan ketegangan di lapangan. Melalui analisis terhadap literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini mencari pemahaman lebih mendalam tentang dinamika konflik ini dan peran lembaga internasional dalam mengatasi krisis. Temuan menggambarkan bahwa hak veto Rusia menghambat langkah tegas PBB, sementara krisis kemanusiaan dan ketegangan politik menyulitkan peran mediasi PBB. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dampak konflik internasional dan tantangan yang dihadapi lembaga internasional dalam menjaga perdamaian dan menangani krisis kemanusiaan.

Kata Kunci : Peran PBB, Konflik Rusia Dan Ukraina

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, Rusia mengambil alih Crimea, wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina. Tindakan ini secara internasional dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan menciptakan dasar konflik. Konflik berlanjut di wilayah timur Ukraina, terutama di wilayah Donbas, yang melibatkan pemberontakan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Pertempuran berdarah antara pihak-pihak yang bertikai menyebabkan kerusakan besar dan hilangnya nyawa. Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik internasional. Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan dan telah menggunakan hak tersebut untuk melindungi kepentingan sendiri dalam konteks konflik Ukraina. Hal ini telah menghambat upaya PBB untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Selain PBB, berbagai aktor internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah terlibat dalam upaya mediasi dan sanksi terhadap Rusia. Tidak semua negara

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 16, 2023

* Putri Permata A Harahap, putrypermaataa@gmail.com

anggota PBB sepakat dalam pendekatan terhadap konflik ini, menciptakan ketegangan diplomatik. Konflik telah menciptakan krisis kemanusiaan dan pengungsian besar-besaran. Jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, memicu kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan. PBB telah berupaya untuk memediasi dan membantu dalam penyelesaian konflik ini melalui berbagai mekanisme, seperti Misi Pemantauan PBB di Ukraina. Namun peran PBB dalam mengatasi konflik ini terus menghadapi banyak hambatan akibat perbedaan politik dan pandangan di tingkat Internasional serta ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah - masalah penelitian. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020a).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011)

Pengumpulan Data

Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

Analisa Data

Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur – angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian – bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber – sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu - waktu diperlukan. (Darmadi, 2011).

PEMBAHASAN

1. Bagaimana penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB memengaruhi upaya penyelesaian konflik di Ukraina?

Dewan Keamanan PBB memegang peran yang sangat besar dan kuat untuk merealisasikan tujuan menjaga perdamaian keamanan internasional. Hak Veto sendiri menurut D. W Bowett (1992) adalah hak yang digunakan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Tidak jarang keputusan yang diputuskan Dewan Keamanan dalam berbagai keadaan mendesak, justru memiliki muatan politis. Selain mencari jalan keluar untuk suatu sengketa atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang sedang dihadapi, para anggota tetap Dewan Keamanan sering menyalah gunakan hak veto yang dimiliki sebagai jembatan kepentingan nasional masing-masing. Kekuatan hak veto sangat menyimpang dari alasan awal pembentukan dan tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan melakukan tindakan bersama. Salah satu kasus yang kontroversial mengenai hak veto adalah penggunaan veto oleh Rusia dalam kasus referendum Crimea.

Konflik ini diawali pada tahun 2013 saat terjadi kudeta di kota Kiev terhadap rezim pemerintahan Viktor Yanukovich yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ukraina. Konflik tersebut dimulai setelah Presiden Viktor Yanukovych menyatakan penolakannya untuk menyetujui kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, dan pada akhirnya melakukan kerjasama dengan Rusia. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok Euromaidan atau Eurosquare pada tanggal 21 November 2013 tersebut mulanya bertujuan agar Ukraina berintegrasi atau

menyatukan diri dengan Eropa. Konflik berlangsung sampai bulan Februari 2014 dan meledak ketika aparat kepolisian membalas aksi Euromaidan dengan konfrontatif. Keadaan yang tidak lagi kondusif membuat Presiden Viktor Yanukovych pada akhirnya meninggalkan Kiev pada tanggal 21 Februari 2014. Pada tanggal 27 Februari 2014, angkatan bersenjata Rusia memasuki wilayah Crimea. Crimea merupakan daerah otonomi khusus di semenanjung selatan Ukraina dengan luas 26.100 km persegi yang memiliki ikatan kuat dengan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia menduduki instalasi militer Ukraina, mengambil senjata dan amunisi, memblokir stasiun televisi, serta membantu kelompok separatis untuk memisahkan Crimea dari Ukraina. Seperti yang diketahui Rusia mulai melakukan invasi kepada Ukraina awal tahun 2022, namun penyebab permasalahannya telah terjadi sejak lampau seperti halnya ditahun 2014 dimana Rusia melakukan penggabungan terhadap wilayah Crimea. Namun referendum ini tidak disetujui oleh berbagai negara karena tidak sesuai dengan hukum internasional.

Rusia melakukan intervensi karena ingin Ukraina terus berada dalam pengaruhnya. Tindakan Rusia ini sesuai dengan perspektif realisme dimana negara memiliki sifat seperti manusia yang mementingkan diri sendiri dan ingin menguasai. Seperti Rusia yang ingin Ukraina tetap dalam kendalinya dan mencegah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu puncak dari keinginan menguasai itu mulai muncul saat Ukraina hendak bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang berisi negara super power. Kekhawatiran Rusia ini semakin meningkat ketika NATO hendak mendirikan pangkalan militer di Ukraina dan negara-negara bekas Soviet (Al Jazeera, 2021). Hingga pada 24 Februari 2022 Rusia resmi melakukan invasi kepada Ukraina untuk pertama kali. Tindakan Rusia sesuai menyatakan bahwa negara berusaha meningkatkan kekuatan mereka dalam perimbangan kekuatan agar menghalangi agresor potensial sehingga kekuatan militer tidak terkalahkan.

Selain itu Rusia yang merasa wilayahnya terancam berusaha menekankan penggunaan kekerasan oleh negara agar mencapai tujuan yang diinginkan yakni keamanan. Pada kasus terdahulu saat konflik Rusia Ukraina dalam wilayah Crimea, tanggung jawab Dewan keamanan diatur melalui pasal 14 Piagam PBB dimana Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Maret 2014 mengeluarkan resolusi S/2014/189 yang berisi penolakan pengesahan referendum di wilayah Crimea dan memutuskan bahwa Crimea tetap milik Ukraina namun karena Rusia menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan tetap serta memiliki hak veto, maka Rusia menolak keputusan PBB. Namun karena penolakan berbagai negara dan Ukraina juga menolak bergabung dengan Uni Eropa maka kasus Crimea akhirnya di menangkan oleh Ukraina. Namun pada konflik Rusia Ukraina di Februari 2022, pasca berita bergabungnya Ukraina menjadi bagian dari NATO, Rusia merasa keamanan negaranya terancam sehingga melakukan invasi

besar besaran kepada Ukraina. Pada 28 Februari 2022 PBB yang beranggotakan 193 negara melakukan pertemuan membahas mengenai krisis di Ukraina. Bahkan menegaskan kembali terkait bab VI pasal 34 yang telah di atur bahwa PBB memberi wewenang kepada Dewan Keamanan untuk menyelidiki perselisihan apa pun, atau situasi apa pun yang mungkin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional seperti halnya dalam konflik Rusia Ukraina. Lalu memakai cara pemungutan suara untuk mengisolasi Rusia dengan menghentikan agresi terhadap Ukraina dan meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Tidak hanya itu Dewan Keamanan PBB juga telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Sanksi sanksi tersebut mencakup pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap individu yang terkait dengan konflik. Sanksi-sanksi bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Rusia agar menghormati kedaulatan Ukraina dan menyelesaikan konflik secara diplomatik. Namun dengan adanya hak veto, Rusia terus melancarkan aksi penolakan penarikan mundur pasukan militer di Ukraina dan tetap menginvasi Ukraina, hal tersebut mengindikasikan bahwa Rusia sangat ingin mengendalikan Ukraina dan tidak setuju apabila Ukraina bergabung dengan NATO.

2. Apa dampak krisis kemanusiaan, pengungsian besar-besaran, dan kebutuhan mendesak untuk bantuan akibat konflik di Ukraina?

Dampak atau konsekuensi terbesar akibat adanya perang Rusia dan Ukraina adalah krisis kemanusiaan yang berimplikasi pada sektor ekonomi dan sosial dalam skala besar. Perang yang terjadi menimbulkan ratusan warga sipil kehilangan nyawa, mengalami luka-luka, dan kehilangan hak asasi manusia atas hidup dalam perdamaian. Perang yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia turut menyebabkan terjadinya krisis karena diketahui kedua negara merupakan eksportir bahan makanan, energi, dan sumber daya mineral. Perang yang terjadi telah menyebabkan naiknya harga minyak, gas, dan gandum di pasar global. Negara-negara yang terbiasa mengimpor komoditi dari Rusia maupun Ukraina terpaksa harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Perang juga menimbulkan ancaman inflasi akibat permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan rendahnya persediaan.

Krisis kemanusiaan di Ukraina adalah salah satu dampak dari konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2014. Konflik ini bermula dari krisis politik di Ukraina yang memicu demonstrasi pro-Eropa dan anti-Rusia di Kiev, ibu kota Ukraina. Rusia kemudian melakukan intervensi militer di Krimea, sebuah semenanjung di Laut Hitam yang memiliki mayoritas penduduk etnis Rusia, dan mendeklarasikan aneksasi wilayah tersebut. Konflik ini kemudian meluas ke wilayah timur Ukraina, yang juga didominasi oleh etnis Rusia, yang menuntut otonomi atau pemisahan dari Ukraina. Kelompok separatis pro-Rusia didukung

oleh pasukan dan persenjataan dari Rusia, sementara pemerintah Ukraina berusaha mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan krisis pengungsi. Menurut data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pada tanggal 25 Maret 2022, lebih dari 10 juta warga Ukraina telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 6,5 juta orang mengungsi di kamp-kamp pengungsian Ukraina, sementara 3,7 juta warga Ukraina telah meninggalkan Ukraina. Sekitar 13 juta warga Ukraina diperkirakan masih terjebak di daerah yang terkena bencana karena meningkatnya resiko keamanan, rusaknya fasilitas transportasi, dan kurangnya sumber daya atau informasi tentang bagaimana dan dimana mereka dapat memperoleh keselamatan dan akomodasi. Rangkaian dari dampak perang Rusia dan Ukraina ini adalah terjadinya krisis humaniter atau krisis Hak Asasi Manusia (HAM) jika perang terus berlanjut. Konflik ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi penduduk sipil di Ukraina, terutama di wilayah timur yang menjadi zona perang. Menurut laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Februari 2021, sekitar 3,4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di Ukraina, termasuk 1,9 juta orang yang mengalami pengungsian dalam negeri (IDP) dan 1,5 juta orang yang mengungsi ke negara tetangga. Dampak krisis kemanusiaan ini meliputi: Konflik di Ukraina telah menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Pelanggaran ini dilakukan oleh kedua belah pihak konflik, baik pasukan pemerintah maupun kelompok separatis. Menurut laporan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada Maret 2021, sejak April 2014 hingga Februari 2021, terdapat sekitar 43.000 korban jiwa akibat konflik di Ukraina, termasuk lebih dari 3.000 warga sipil. Selain itu, banyak warga sipil yang mengalami luka- luka, cacat permanen, trauma psikologis, dan stres akut akibat konflik. Konflik di Ukraina juga telah memperburuk kondisi ekonomi dan sosial penduduk sipil di wilayah timur Ukraina. Menurut laporan Bank Dunia pada Oktober 2020, sekitar 40% penduduk di wilayah timur Ukraina hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan 27% di seluruh Ukraina. Konflik juga telah meningkatkan ketidaksetaraan antara wilayah timur dan barat Ukraina, serta antara kelompok etnis, agama, dan gender. Banyak penduduk di wilayah timur Ukraina yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, atau eksklusi sosial akibat konflik. Konflik juga telah mempengaruhi akses penduduk sipil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Dampak krisis kemanusiaan di Ukraina telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk bantuan dari masyarakat internasional. Menurut laporan OCHA pada Februari 2021, sekitar 1,9 juta orang

membutuhkan bantuan perlindungan, 2,4 juta orang membutuhkan bantuan kesehatan, 2 juta orang membutuhkan bantuan air bersih dan sanitasi, 1,2 juta orang membutuhkan bantuan pangan dan gizi, 1 juta orang membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang non-pangan, dan 700.000 orang membutuhkan bantuan pendidikan. Namun, respons kemanusiaan di Ukraina masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya akses ke wilayah konflik, kurangnya sumber daya keuangan, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, krisis kemanusiaan di Ukraina memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menyediakan bantuan yang adekuat dan efektif bagi penduduk sipil yang terdampak.

3. Bagaimana perbedaan politik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat di lapangan mempengaruhi peran PBB dalam mengatasi konflik Ukraina dan upaya mediasinya?

Dengan adanya PBB selama tujuh dekade terakhir, sebagian besar warga global mungkin merasa dalam zona nyaman, di mana tidak terjadi perang-perang fisik seperti sebelumnya. Namun, hal ini dipatahkan dengan operasi militer yang dilakukan Rusia ke sejumlah kota di Ukraina. Serangan ke Ukraina oleh Rusia tersebut adalah serangan militer terbesar di Benua Eropa setelah Perang Dunia II, pun merupakan keberlanjutan dari ketegangan yang sudah ada sebelumnya antara keduanya. Serangan pada 24 Februari 2022 itu diyakini Rusia sebagai upaya menjaga rasa aman dari bayang-bayang NATO -satu kekuatan militer negara-negara barat, di wilayah yang berbatasan langsung dengan negaranya. Kondisi security dilemma, kondisi di mana suatu negara berusaha meningkatkan keamanannya seperti dengan memperkuat militer, bergabung dalam aliansi dan sebagainya. Namun, tindakan ini direspon oleh negara lainnya (terlebih negara tetangganya) sebagai ancaman, sehingga ikut meningkatkan keamanannya pula untuk mengantisipasi apabila negara pertama (ataupun bersama aliansinya) melancarkan serangan. Akan tetapi, tindakan Rusia tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Ukraina saat itu bahkan baru mengungkapkan niatannya saja untuk bergabung dengan NATO. Selain itu, Ukraina maupun NATO pun tidak melakukan serangan tertentu kepada Rusia, sehingga bukan merupakan kondisi mendesak bagi Rusia untuk membombardir Ukraina. Ukraina sudah merdeka pada 24 Agustus 1991, serta telah menjadi anggota PBB yang berarti Ukraina merupakan negara merdeka dan berdaulat. Rusia dalam hal ini dengan terang telah melanggar hukum internasional dengan menyerang wilayah kedaulatan Ukraina dan mengabaikan PBB sebagai institusi internasional yang berwenang menengahi permasalahan semacam itu. PBB sebagai organisasi bermisi perdamaian internasional dengan keanggotaan hampir seluruh negara di dunia, ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang

bahkan banyak memakan korban jiwa seperti di Ukraina. Baru pada jumat, 4 Maret 2022 PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, resolusi ini dikhususkan kepada Rusia yang telah melakukan invasi adapun resolusi itu memiliki tujuh poin diantaranya :

1. "Mengecam (deplore) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari Federasi Rusia melawan Ukraina, serta Mengutuk (condemn) deklarasi 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia terkait 'operasi militer khusus' di Ukraina."Resolusi itu juga meminta Rusia mengikuti Piagam PBB pasal 2 yang melarang negara anggota melanggar integritas wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan.
2. Menuntut Federasi Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk.Juga menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya, secara menyeluruh, dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam batas-batas yang diakui secara internasional.
3. Menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menyetop segala ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap Negara Anggota. Mengekspresikan kekhawatiran besar pada laporan-laporan serangan pada fasilitas-fasilitas sipil seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit, dan korban sipil, seperti wanita, orang lansia, orang-orang dengan disabilitas, dan anak-anak.
4. PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut dengan kekuatan militer.
5. Mengingatkan tanggung jawab semua Negara di bawah Pasal 2 dari Piagam untuk menahan diri pada hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau independensi politik dari Negara manapun, atau dengan cara lain yang tak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara-cara damai.
6. Mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagaimana Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian.
7. Mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk menambah kesiapan dari pasukan nuklir mereka. Salah satu contoh mediasi PBB dalam konflik antara Rusia dan Ukraina adalah upaya untuk membentuk Misi Pengamat Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Ukraina (OSCE). Pada tahun 2014, PBB melalui OSCE membentuk misi pengamat untuk memantau situasi di Ukraina, termasuk kawasan-kawasan yang terkena dampak konflik di Donbas dan Crimea. Misi ini bertujuan untuk memantau dan melaporkan perkembangan konflik, membantu

memfasilitasi dialog, dan mencari solusi damai. OSCE bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Rusia, Ukraina, dan pemerintah-pemerintah terkait untuk mencoba memitigasi eskalasi konflik dan mendorong implementasi gencatan senjata serta perundingan damai. Upaya mediasi semacam ini menjadi salah satu wujud kontribusi PBB dalam mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik tersebut. Peran mediasi PBB dalam mengatasi konflik antara Rusia dan Ukraina adalah memfasilitasi dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi damai. PBB berupaya untuk mendorong gencatan senjata, memfasilitasi pembicaraan, dan menggalang dukungan internasional untuk penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Namun, upaya mediasi ini tergantung pada kebijakan dan kerjasama semua pihak terkait.

KESIMPULAN

Penggunaan hak veto oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB memengaruhi upaya penyelesaian konflik di Ukraina dengan menghalangi tindakan bersama untuk mengatasi krisis, terutama terkait pengambilalihan wilayah Crimea. Hal ini mencerminkan bahwa kepentingan nasional dapat mendominasi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, meskipun hal tersebut melanggar tujuan awal PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dampak dari konflik ini termasuk krisis kemanusiaan, pengungsian besar-besaran, dan kebutuhan mendesak untuk bantuan, yang menggambarkan kerentanannya penduduk sipil dan kompleksitas penanganannya. Upaya mediasi PBB, seperti melalui OSCE, adalah salah satu upaya dalam mencari solusi damai dan meredakan ketegangan, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung pada kebijakan dan kerjasama pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atok, F. (2022). Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina. *Jurnal Poros Politik*, 11-15.
- Crystalia Shabrina Najmi¹, R. L. (2022). Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022.
- Hartana, I. K. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Negara Rusia Dan Ukraina Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Mutiria Anastasya Darmansyah*, E. F. (2021). Inkonsistensi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan . *Diponegoro Law Journal*.
- Teguh, M. A. (2021). Relevansi Hak Veto Pbb Dengan Prinsip Kedaulatan . *education and development*.